

ABSTRAK

Badriansyah.20160402036. Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Hukum, Universitas Esa Unggul

Tesis ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”. Judul ini untuk menjawab pertanyaan tentang pembuktian terjadinya tindak pidana dalam pelanggaran rahasia dagang ketika terjadi sengketa rahasia dagang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000. Dan lebih jelas lagi diatur dalam pasal 11 Undang-undang No.30 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang melakukan pelanggaran rahasia dagang, serta pemecahan masalah yang timbul dalam implementasi Undang-undang Rahasia Dagang. Tesis ini merupakan hasil Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Sedangkan Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. mengkaitkan dengan penelitiannya bahwa dalam undang-undang rahasia dagang, undang-undang ketenagakerjaan, kitab undang-undang hukum perdata tidak mengatur secara eksplisit tentang perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha terhadapnya kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang yang sebenarnya sangat penting untuk menjaga kerahasiaannya. Menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Rahasia Dagang tanpa membuktikan adanya Rahasia Dagang, adalah menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil. Rahasia Dagang harus dibuktikan semua unsurnya sesuai dengan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000, tidak dapat hanya dengan mendengarkan keterangan ahli mengidentifikasi melalui sebuah alat bukti surat. Pembuktian pelanggaran Rahasia Dagang memerlukan pengetahuan khusus, hakim dapat dilengkapi dengan referensi yang *up to date* maupun dengan ahli yang kompeten dan berkualitas. Hukuman pidana juga hendaknya menjadi *ultimum remidium*.

Kata kunci : rahasia dagang, pembuktian, penyelesaian sengketa,